

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia telah menjadi isu krusial sejak diterapkannya otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelolan sumber daya keuangan secara mandiri. Pemerintah memiliki misi pembangunan nasional agar masyarakat hidup dengan sejahtera. Selain itu, pemerintah juga senantiasa menciptakan tata kelola pemerintah yang baik untuk menciptakan pembangunan nasional. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan *E-Government* dan Peraturan Presiden No . 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Namun, dalam praktiknya berbagai gejala dan fenomena negatif terus muncul, seperti inefisiensi, alokasi anggaran, kurangnya transparansi dalam pengeluaran, dan lemahnya mekanisme pengawasan internal, yang secara keseluruhan menghambat pencapaian kinerja pengelolaan keuangan daerah yang optimal.

Fenomena tersebut tidak hanya terlihat secara nasional, tetapi juga sangat menonjol di Provinsi Jawa Barat yang merupakan provinsi terpadat dengan 27 pemerintah kabupaten/kota mencakup wilayah yang beragam. Jawa Barat menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan keuangan daerah, menurut

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Semester II Tahun 2022, sebanyak 65% dari 27 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat mengalami temuan ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran dengan nilai total mencapai Rp 12,5 triliun, termasuk kasus penyalahgunaan dana, keterlambatan pelaporan keuangan dan ketidakefisienan dalam penyerapan anggaran (BPK, 2023). Data ini menunjukkan bahwa fenomena inefisiensi bukanlah kasus sporadik melainkan bersifat sistematis.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara capaian kinerja keuangan daerah secara formal dengan kondisi riil pengelolaan keuangan di lapangan. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan capaian indikator administratif lainnya belum sepenuhnya mencerminkan efisiensi, efektivitas, serta kualitas pengelolaan anggaran daerah. Fenomena ini mengindikasikan bahwa permasalahan pengelolaan keuangan daerah di Jawa Barat tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat struktural dan sistematis.

Secara teoritis, fenomena ini menunjukkan indikasi lemahnya penerapan *e-government*, transparansi anggaran, dan pengawasan internal. Padahal, ketiga variabel tersebut merupakan pilar utama dalam mewujudkan *good governance* untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi dan partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan daerah. Di Jawa Barat, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta beberapa kasus yang terungkap di media seperti korupsi pengadaan infrastruktur di Kabupaten Indramayu (Candra, 2024) dan keterlambatan realisasui anggaran serta proyek fisik di Kota Bandung menjadi bukti empiris yang memperkuat urgensi penelitian ini.

Fenomena rendahnya kinerja pengelolaan keuangan daerah di Jawa Barat dapat diukur melalui beberapa indikator utama, seperti opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Tingkat penyerapan anggaran, serta efisiensi penggunaan APBD. Berdasarkan data BPK RI, dari 27 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat sebanyak 26 daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 2 daerah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2020. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan menjadi fondasi bagi perbaikan serta fluktuasi yang terjadi pada tahun-tahun berikutnya, hingga pada tahun 2023 dimana 22 daerah berhasil memperthankan opini WTP dan 5 daerah memperoleh opini WDP (BPK RI, 2024).

Tantangan ini diperparah oleh fenomena inefisiensi anggaran dan keterlambatan pelaporan keuangan. Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa Tingkat realisasi belanja pemerintah daerah di Jawa Barat tahun 2023 mencapai Rp 117,52 triliun (98,2% dari APBD) dengan realisasi belanja modal hanya Rp 9,83 triliun, menandakan adanya ketidakefisienan dalam mengalokasikan dana untuk Pembangunan. (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2023). Sementara itu, BPK (2023) mencatat bahwa banyak pemerintah daerah yang menyelesaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di luar batas waktu yang ditetapkan, mencerminkan lemahnya sistem akuntansi dan pengendalian internal.

Kedua fenomena ini secara teoritis merupakan indikator utama langsung dari lemahnya penerapan e-government, terbatasnya transparansi anggaran, dan tidak efektifnya pengawasan internal. Rendahnya penyerapan anggaran berdampak

buruk pada pelayanan publik, yang dapat dilihat dari seringnya keterlambatan Pembangunan infrastruktur dan ketidaktuntasan penyaluran program bantuan sosial di berbagai daerah. Di sisi lain, efektivitas pengawasan internal juga menjadi tantangan mendasar. Laporan BPK mencatat 3.757 temuan ketidakpatuhan di seluruh Indonesia dengan nilai Rp 6,64 triliun (Wahidmurni, 2023), yang mencakup sejumlah temuan signifikan di kabupaten/kota di Jawa Barat. Temuan ini merefleksikan lemahnya fungsi pengawasan internal dalam mencegah dan mendeteksi penyimpangan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam kinerja pengelolaan keuangan daerah. Idealnya penerapan *e-government* mampu menciptakan pemerintahan yang efisien dan transparan. Demikian pula, prinsip transparansi anggaran dan pengawasan internal yang baik merupakan pilar penting dalam tata kelola keuangan yang akuntabel. Namun, penerapan ketiganya di lapangan belum tentu optimal sehingga kinerja pengelolaan keuangan pun belum maksimal.

Secara teoritis, hubungan antara variabel-variabel ini dapat dijelaskan melalui Agency Theory (Jensen & Mackling, 1976). Teori ini menyatakan bahwa konflik kepentingan dan asimetri informasi antara *principal* (masyarakat) dan *agent* (pemerintah) dapat diminimalisir dengan mekanisme pengawasan dan transparansi. *E-Government*, transparansi anggaran, dan pengawasan internal adalah bentuk dari mekanisme tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat.

Namun kondisi empiris di Jawa Barat menunjukkan ketidaksesuaian yang mencolok dengan kondisi ideal tersebut. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SPBE 2023 dari Kementrian PANRAB, indeks SPBE nasional pada tahun 2023 mencapai 2,79 kategori “Baik” dengan rincian indeks per pemerintah daerah termasuk Provinsi Jawa Barat beserta kabupaten/kota di dalam nya (Kementerian PAN-RB, 2023). Sementara itu, dokumen progres evaluasi SPBE Jawa Barat menyebutkan bahwa sejumlah daerah di Jawa Barat telah melaporkan nilai SPBE seperti 3,50, 3,00, atau 4,00 walaupun tidak semua daerah mencapai kategori “Sangat Baik” (Dan et al., 2025). Capaian ini mengindikasikan bahwa integritas sistem digital dalam tata kelola keuangan daerah masih belum merata. Namun, capaian nilai SPBE yang relatif baik tersebut belum tentu mencerminkan pemanfaatan e-government secara efektif dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh.

Dari sisi transparansi, Provinsi Jawa Barat menunjukkan kinerja yang paradoks. Di tingkat provinsi, komitmen keterbukaan sangat kuat, yang tercermin dari diraihnya peringkat pertama Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) secara nasional pada tahun 2023 dengan nilai 84,43 poin, yang juga mengalami kenaikan 2,5 poin dibandingkan IKIP 2022 dengan nilai 81,93 poin (Ajat, 2025). Namun, capaian di level provinsi ini menyimpan tantangan fundamental, karena tingginya keterbukaan informasi tersebut belum tentu mencerminkan tingkat transparansi anggaran yang merata pada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Tingkat keterbukaan yang tinggi belum tentu merata di seluruh wilayah. Asumsi bahwa kinerja transparansi provinsi langsung merepresentasikan kinerja

seluruh kabupaten/kota di dalamnya patut untuk di uji. Kesenjangan potensial inilah yang diduga kuat mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah secara tidak seragam. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan transparansi anggaran sebagai variabel kunci untuk dibuktikan pengaruhnya terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangann Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Jika ditinjau secara lebih khusus di Provinsi Jawa Barat, kondisi pengawasan internal juga menunjukkan permasalahan yang serupa. Dalam periode yang sama, laporan BPK mencatat sejumlah temuan ketidakpatuhan dan penyimpangan yang signifikan di berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat. Nilai kerugian dan potensi penyimpangan yang terungkap mencapai ratusan miliar rupiah, menandakan bahwa tantangan efektivitas pengawasan internal bukan hanya masalah nasional, tetapi juga sangat nyata di tingkat provinsi. Keadaan ini mengindikasikan perlunya penguatan sistem pengawasan dan peningkatan kapasitas aparatur pengawas di Jawa Barat agar tata kelola keuangan daerah dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Fenomena ini jelas tidak bisa dibiarkan. Diperlukan terobosan dan pendekatan sistematis untuk membenahi tata kelola keuangan, yang tidak hanya mengendalikan pengawaan internal konvensional yang telah terbukti rentan gagal. Era digital dan tuntutan transparansi publik menawarkan solusi alternatif. Di sinilah *e-government*, transparansi anggaran, dan penguatan pengawasan internal hadir sebagai sebuah trilogi solusi yang diyakini dapat menciptakan ekosistem pengelolaan keuangan yang lebih sehat. *E-government* diharapkan dapat meminimalkan investasi manusia yang rawan kesalahan dan kecurangan, transparansi anggaran menciptakan

mekanisme pengawasan oleh publik, sementara pengawasan internal yang efektif berperan sebagai benteng pertahanan terakhir. Oleh karena itu, penelitian untuk menganalisis pengaruh penerapan ketiga variabel ini terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah di Jawa Barat menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan, sebagai upaya mencari jawaban empiris atas masalah krusial yang diungkap oleh BPK tersebut.

Apabila kondisi ini dibiarkan tanpa adanya pengujian empiris yang komprehensif, pemerintah daerah berpotensi terjebak pada kinerja pengelolaan keuangan yang bersifat administratif dan formalistik, tanpa diikuti oleh peningkatan kualitas realisasi anggaran dan pelayanan publik. Hal ini berisiko menurunkan efektivitas penggunaan APBD serta menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penelitian yang mengkaji pengaruh penerapan e-government, transparansi anggaran, dan pengawasan internal terhadap pengelolaan kinerja keuangan daerah menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan fokus pada penerapan e-government, transparansi anggaran, dan pengawasan internal. (Suhendro, 2024) menemukan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh penelitian (Risya Nurindahsari & Trisyanto, 2022) bahwa penerapan sistem e-government memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sementara pengaruhnya terhadap transparansi belum signifikan secara parsial. Sementara itu, studi oleh

(Helena Adventy Gudipung et al., 2024) menemukan bahwa transparansi, standar akuntansi pemerintah, dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, namun pengaruhnya relative moderat. Berbeda dengan hasil tersebut, penelitian dalam (Maharani & Gamayuni, 2025) menunjukkan bahwa variabel *e-government* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan transparansi anggaran tidak memiliki signifikan secara parsial.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi empiris antar penelitian sebelumnya terkait hubungan antara *e-government*, transparansi, dan pengawasan internal terhadap kinerja atau kualitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada indikator akuntabilitas atau kualitas laporan keuangan sebagai ukuran kinerja, bukan pada kinerja pengelolaan keuangan daerah secara komprehensif yang mencakup efektivitas belanja, efisiensi anggaran, dan capaian realisasi APBD. Penelitian terdahulu juga umumnya dilakukan pada tingkat nasional atau provinsi tanpa memperhatikan variasi karakteristik antar kabupaten/kota. Padahal, Jawa Barat memiliki 27 pemerintah daerah tingkat penerapan *e-government*, transparansi, dan pengawasan internal yang berbeda-beda.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian baik dari sisi empiris maupun kontekstual. Secara empiris, belum terdapat hasil yang konsisten mengenai pengaruh masing-masing variabel terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Secara kontekstual, masih terbatas penelitian yang meneliti secara spesifik kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan data

terbaru, yang mencakup dinamika pra-pandemi, masa pandemi, hingga fase pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, berdasarkan fenomena empiris, hasil penelitian terdahulu serta adanya kesenjangan kajian, maka penelitian berjudul **“Pengaruh Penerapan *E-Government*, Transparansi Anggaran, dan Pengawasan Internal terhadap Pengelolaan Kinerja Keuangan Daerah pada SKPD Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya”** penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah di Jawa Barat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa pertanyaan mengenai gambaran ruang lingkup penelitian yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan *E-Government*, Transparansi, Anggaran Pengawasan Internal dan Pengelolaan Kinerja Keuangan Daerah pada SKPD Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis.
2. Bagaimana Pengaruh Penerapan *E-Government*, Transparansi Anggaran, dan Pengawasan Internal terhadap Pengelolaan secara Parsial terhadap Pengelolaan Kinerja Keuangan Daerah pada SKPD Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis
3. Bagaimana Pengaruh Penerapan *E-Government*, Transparansi Anggaran, dan Pengawasan Internal terhadap Pengelolaan secara Bersama-sama

terhadap Pengelolaan Kinerja Keuangan Daerah pada SKPD Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penerapan *E-Government*, Transaparansi Anggaran, Pengawasan Internal dan Pengelolaan Kinerja Keuangan Daerah pada SKPD Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan *E-Government*, Transaparansi Anggaran, dan Pengawasan Internal terhadap Pengelolaan secara Parsial terhadap Pengelolaan Kinerja Keuangan Daerah pada SKPD Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan *E-Government*, Transaparansi Anggaran, dan Pengawasan Internal terhadap Pengelolaan secara Bersama-sama terhadap Pengelolaan Kinerja Keuangan Daerah pada SKPD Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi khususnya untuk pengkajian topik-topik penelitian dan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik dan manajemen keuangan daerah.

2. Kegunaan Praktis

Dapat digunakan sebagai referensi, bahan pertimbangan serta motivasi untuk keperluan penelitian selanjutnya dengan topik yang sama ataupun yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan direncanakan pada bulan September 2025 sampai dengan bulan Juli 2026. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table lampiran